



UPAYA MENINGKATKAN KINERJA GURU DALAM MENETAPKAN KRITERIA KETUNASAN MINIMAL MELALUI WORKSHOP DI LUBUKLINGGAU

Fahrunrosi

Kementrian Agama Kota Lubuklinggau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION	A B S T R A C T
<p>Received: November 13, 2021 Revised: Desember 2, 2021 Available online: Desember 30, 2021</p>	<p>School action research with problem formulation What are the efforts to improve the ability of teachers in setting Minimum Completeness Criteria (KKM)? and whether through the workshop can improve the ability of teachers in setting Minimum Completeness Criteria (KKM) subject teachers. The purpose of this research is to increase the ability of teachers in determining the Minimum Completeness Criteria (KKM) for subjects. The results of this study are expected to be useful and provide a learning experience for teachers, because through the workshop teachers are given materials and exercises to determine the Minimum Completeness Criteria (KKM) according to their subjects. And subject teachers can have the ability to set Minimum Completeness Criteria so that the teaching and learning process is better. 40 teachers were involved in the research through this workshop. The research design is cyclical, consisting of 4 stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. From the analysis, it is found that there is an increase in teacher readiness and performance in determining minimum completeness criteria from cycle I to cycle II. The achievement of performance indicators is found in the second cycle of action. Therefore, it can be concluded that through workshops can improve teacher performance in setting minimum completeness criteria in Lubuklinggau. Thus, it can be suggested to supervisors or other researchers that workshop activities can be used as an alternative in improving teacher performance in setting minimum completeness criteria.</p>
<p>KEYWORDS</p>	
<p>Keywords: <i>Performance, KKM, Workshop</i></p>	
<p>CORRESPONDENCE</p>	
<p>E-mail: fahrunrosi@gmail.com</p>	

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan



yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Selanjutnya, guru melaksanakan pembelajaran dan melakukan penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian KKM. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan KKM perlu dilakukan secara cermat, tidak semata-mata memperhatikan apa yang hendak dicapai, tetapi juga bagaimana keadaan yang ada. Masalahnya kemudian ialah, bagaimana menyusun, menetapkan KKM?. Dalam upaya meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan di sekolah masing-masing satuan pendidikan, baik Kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dibuat memberikan kebebasan menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah tanpa mengabaikan tuntutan mutu secara nasional. Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui KKM yang ditetapkan itu tidak dapat dipenuhi karena penyusunan dan penetapannya kurang tepat dan kurang berpedoman pada ketentuan yang ada. Dengan demikian proses dan hasil belajar dan membelajarkan di sekolah tidak mencapai mutu seperti yang direncanakan. Tulisan berikut membahas cara menyusun dan menetapkan KKM untuk masing-masing mata pelajaran dengan tujuan dapat memberikan pencerahan kepada guru dan sekolah sehingga peserta didik dan guru, serta sekolah secara keseluruhan, dapat memenuhi KKM secara baik.

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan



Pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi yang menggunakan acuan kriteria dalam penilaian, yang mengharuskan tenaga pendidik dan satuan pendidikan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dengan analisis serta memperhatikan mekanisme, prinsip dan langkah-langkah penetapan. Kenyataan dilapangan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan prinsip serta langkah-langkah penetapan. Sehingga sebagian besar guru-guru madrasah Kota Lubuklinggau menetapkan KKM hanya berdasarkan alasan agar mudah dicapai siswa dan lebih terkesan “sesuai yang aku mau” secara spontan menyebut suatu “angka aman”, sehingga tidak berani menetapkan KKM dengan angka lebih tinggi. Penetapan KKM tidak dibentuk menggunakan kriteria-kriteria yang sebenarnya.

Guru tidak dapat menunjukkan dasar penetapan KKM secara tertulis, guru hanya memberikan suatu angka. Sementara itu ada juga sejumlah guru beranggapan penetapan KKM merepotkan, hanya menambah pekerjaan, dan belum dapat melihat manfaat tambahan bagi guru. Akibatnya KKM yang ditetapkan kurang mencerminkan intake siswa, kompleksitas bahan ajar, serta daya dukung yang dimiliki. Guru tidak melakukan perubahan dan pembangunan diri dalam pembelajarannya. Seolah-olah ada atau tidak ada KKM sama saja, yang penting semua bahan ajar telah diajarkan. Tidak terlihat semangat guru yang dapat mempengaruhi siswa berusaha mencapai KKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (*action research*) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui Workshop di Lubuklinggau. Tindakan yang akan dilakukan adalah Workshop Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Jenis penelitian tindakan yang dipilih adalah jenis emansipatori. Jenis emansipatori ini dianggap paling tepat karena penelitian ini dilakukan untuk



mengatasi permasalahan pada wilayah kerja peneliti sendiri berdasarkan pengalaman sehari-hari. Dengan kata lain, berdasarkan hasil observasi, refleksi diri, guru bersedia melakukan perubahan sehingga kinerjanya sebagai pendidik akan mengalami perubahan secara meningkat.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan model Kemmis yang terdiri atas empat langkah, yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi (Wardhani, 2007:45). Model ini dipilih karena dalam mengajarkan menulis naskah pidato diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, dan langkah-langkah setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran hasil yang didapat berdasarkan rekaman fakta atau observasi dilapangan, para guru madrasah pada awalnya pemahaman terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal masih Sangat kurang, hal ini dikarenakan persepsi guru menganggap bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal tidak terlalu penting, disamping itu acuan, pelatihan, atau sosialisasi KKM juga kurang. Pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan, yaitu menitik beratkan pada kompetensi guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal sebagai akibat diterapkan workshop. Tujuan dilaksanakan pengamatan adalah untuk mengetahui kegiatan mana patut dipertahankan, diperbaiki, atau dihilangkan sehingga kegiatan pembinaan melalui workshop benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang ada dan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Kegiatan peserta juga diobservasi, mengenai: kesiapan mental dan fisik guru, kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada waktu workshop, kehadiran guru, kesiapan laptop, kualitas KKM, dan respon guru. Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta yang berjumlah 34 orang dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan, diperoleh data sebagai berikut :



Tabel 1

Rekap Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru Dalam Mengikuti Workshop pada Siklus I

Pencapaian Hasil Kesiapan dan Kehadiran Guru	Aspek Yang Diamati							
	Kesiapan mental dan fisik guru		Kesiapan bahan		Kehadiran guru		Kesiapan Laptop	
	Siap (S)	Tidak Siap (TS)	Siap (S)	Tidak Siap (TS)	Hadir (H)	Tidak Hadir (TH)	Siap (S)	Tidak Siap (TS)
Jumlah	36	9	20	25	40	5	10	35
Persentase (%)	80,00	20,00	44,44	55,56	88,89	11,11	22,22	77,78
Pencapaian indikator keberhasilan	Belum tercapai		Belum tercapai		Belum tercapai		Belum tercapai	

Berdasarkan table 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa, pada aspek kasiapan mental dan fisik guru sebanyak 36 orang atau 80,00% peserta siap dan sebanyak 9 orang atau 20,00% tergolong belum siap. Pada aspek kesiapan bahan sebanyak 20 orang atau 44,44% peserta siap dan sejumlah 25 orang atau 55,66% belum siap. Pada aspek kehadiran guru sejumlah 40 atau 88,89% hadir dan sebanyak 5 orang atau 11,11 tidak hadir. Sedangkan pada aspek kesiapan membawa laptop sebanyak 10 orang atau 22,22% siap dan sejumlah 30 orang atau 77,78% peserta belum siap. Berdasarkan dekripsi ini ternyata kesiapan guru dalam mengikuti kegiatan workshop belum memenuhi kriteria keberhasilan untuk semua aspek sebagaimana yang telah ditetapkan diatas. Dari hasil evaluasi terhadap penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dibuat oleh 45 orang peserta yang mengikuti workshop pada siklus I seperti tampak pada tabel berikut ini:



Tabel 2

Rekap Hasil Penilaian Guru Terhadap Langkah-Langkah Penetapan KKM Pada Siklus I

No	Aspek	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Prosentase (%)
1	Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan tiga aspek; kompleksitas, daya dukung, dan intake	3.300	73,33	73,33
2	KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, dan terakhir mata pelajaran	2800	62,22	62,22
3	Hasil penetapan KKM oleh guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah	3500	77,78	77,78
4	KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama	4000	88,89	88,89
5	KKM dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) atau Raport	4.500	100	100
Jumlah			402,22	402,22
Rata – rata			80,44	80,44

Dari tabel 2 di atas terlihat pada aspek Penetapan KKM mata pelajaran yang memperhatikan kompleksitas, daya dukung dan intake dalam katagori baik, pada aspek KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, dan terakhir mata pelajaran dalam katagori cukup, aspek pengesahan oleh Kepala Sekolah berada pada katagori baik. Sedangkan pada aspek KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama serta KKM dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) atau Raport bagaimanapun caranya guru mendapatkan KKM pasti disosialisasikan pada siswa, orang tua, dan ditulis dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) atau Raport.

Berdasarkan dekripsi pada tabel 1 dan 1 tersebut di atas ternyata kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran .belum memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan pada semua aspek kecuali pada aspek keempat dan kelima yakni KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua,



Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama serta KKM dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) atau Raport bagaimanapun caranya guru mendapatkan KKM pasti disosialisasikan pada siswa, orang tua, dan ditulis dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) atau Raport.

Pada siklus II (Kedua), langkah-langkah yang diambil sesuai dengan refleksi hasil siklus I, dengan memfokuskan pada penjelasan aspek-aspek yang belum dipahami guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal, lebih menitik beratkan pada aspek pembimbingan secara individu. Dari 40 orang guru semua dilibatkan dalam siklus II untuk memperdalam pengetahuan tentang penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Setelah siklus II dijelaskan yang mengacu pada refleksi dan pemecahan masalah pada siklus I diperoleh data seperti tampak pada tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rekap Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru Dalam Mengikuti Workshop pada Siklus II

Pencapaian Hasil Kesiapan dan Kehadiran Guru	Aspek Yang Diamati							
	Kesiapan mental dan fisik guru		Kesiapan bahan		Kehadiran guru		Kesiapan Laptop	
	Siap (S)	Tidak Siap (TS)	Siap (S)	Tidak Siap (TS)	Hadir (H)	Tidak Hadir (TH)	Siap (S)	Tidak Siap (TS)
Jumlah	36	4	38	2	40	0	25	15
Persentase (%)	88,24	11,76	91,18	8,82	100	0	62,50	37,50
Pencapaian-indikator keberhasilan	Tercapai Siap Amat Baik		Tercapai Siap Amat Baik		Tercapai Siap Amat Baik		Tercapai Siap Cukup	

Dari tabel 3 diatas, tampak bahwa : pada aspek kesiapan mental dan fisik sebanyak 36 orang atau 88,24 % siap dan sejumlah 4 orang atau 11,76 % tidak siap. Pada aspek kesiapan bahan ternyata sebanyak 38 orang atau 91,18 % siap dan sejumlah 2 orang atau 8,82 tidak siap. Pada kehadiran mengikuti workshop sebanyak 40 orang hadir atau 100 % semua peserta hadir. Pada aspek kesiapan membawa laptop terlihat bahwa sebanyak 25 orang atau 62,50 % siap dan sejumlah 15 orang atau 37,50 % tidak siap atau tidak membawa laptop.



Berdasarkan deskripsi ini tampaknya kehadiran guru dalam mengikuti workshop sudah memenuhi 100 %, sedangkan untuk aspek yang lainnya belum mencapai 100%, terutama sekali mungkin karena belum memiliki laptop.

Dari hasil evaluasi terhadap penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal oleh guru yang ikut workshop pada siklus II diperoleh hasil seperti pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Hasil Penilaian Guru Dalam Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal pada Siklus II

No	Aspek	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Prosentase (%)
1	Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan tiga aspek : kompleksitas, daya dukung, dan intake.	4.000	100	100
2	KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK dan terakhir mata pelajaran	2.500	62,50	62,50
3	Hasil penetapan KKM oleh guru mata pelajaran disahkan oleh Kepala Sekolah	4.000	100	100
4	KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan	4.000	100	100
5	KKM dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) atau Raport KTSP 2006. Sedangkan Rapor Kurikulum 2013 tidak dicantumkan, melainkan ditulis pada buku nilai pegangan guru.	4.000	100	100
Jumlah Nilai			462,50	462,50
Rata-rata			92,50	92,50

Dari tabel 4 diatas, bila dilihat dari rata-rata secara umum dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal pada siklus II berada pada amat baik atau rata-rata 92,50, namun ada satu aspek yang belum bisa 100 % , bahkan berada pada Kriteria cukup yaitu pada aspek 2 yakni KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, terakhir mata pelajaran. Untuk hal ini dapat saya jelaskan bahwa pada madrasah, sebanyak 25 orang guru tidak tetap kesulitan dalam mengembangkan silabus, RPP, dan penetapan indikator pada KD, SK, dan mata pelajaran, sehingga akhirnya KKM



dibuat tidak per indikator. Respon guru terhadap penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui workshop amat baik.

Penilaian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang respon guru terhadap kegiatan workshop yang telah di harapkan dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Jika kita lihat dari nilai atau prosentase guru yang dapat menetapkan KKM dengan memenuhi mekanisme dari kajian awal, siklus I, dan siklus II adalah 82,80 %, dan kemudian 92,81 % ini menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Jadi dapat dikatakan bahwa respon guru sangat positif. Oleh karena itu, penerapannya perlu dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain.

Berdasarkan data hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya serta rangkuman pada tabel 1 sampai dengan tabel 4 diatas, maka dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan aktifitas peserta dalam kegiatan workshop tentang Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal bagi guru pada madrasah. Disamping itu juga terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui workshop di Lubuklinggau. dari siklus I ke siklus II pada masing-masing aspek dengan target ketercapaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal di Madrasah Tsnowiyah dan Madrasah Aliyah Kota Lubuklinggau.

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh tentang Kriteria Ketuntasan Minimal sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, maka penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal dengan baik. Mengoptimalkan pemahaman guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembina intensip dalam bentuk penyelenggaraan workshop menunjuk pada metode kooperatif konsultatif dimana diharapkan para guru berdiskusi, bekerja sama dan



berkonsultasi secara aktif. Aktifitas ini akan sangat membantu mereka dalam memahami Kriteria Ketuntasan Minimal akhirnya nanti mereka mampu menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Dalam kaitannya dengan pembinaan melalui workshop, maka penelitian ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Amstrong (1990:209) bahwa tujuan *workshop* adalah untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Siswanto (1989:139) mengatakan *workshop* bertujuan untuk memperoleh nilai tambah seseorang yang bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersangkutan. *Workshop* dimaksudkan untuk mempertinggi kemampuan dengan mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri (As' ad, 1987:64). Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan *workshop* yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan *sharing* antara satu guru dengan guru lain. Sehingga melalui Workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) guru mata pelajaran dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun dalam implementasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pelaksanaan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui workshop untuk peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dimulai dari



supervisi awal guna mengenali masalah yang ada dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal, berikutnya dilakukan presentasi pada masing-masing kelompok guru mata pelajaran. Peneliti mengamati dan menilai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan guru. Dari penilaian tersebut kemudian dievaluasi bagian mana yang belum sesuai dengan Kriteria, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan. Melalui tahapan tersebut guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal meningkat.

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembinaan berupa workshop pada madrasah di Lubuklinggau dari siklus I sebesar 82,80 % meningkat pada siklus II sebesar 92,81 % dan mencapai target minimal yang telah ditetapkan yakni 85 %. Hal ini berarti 85 % guru telah efektif dan memberi respon yang positif dalam kegiatan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal pada madrasah.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan diawali dengan penyusunan dan penetapan KKM yang baik dan benar sesuai kriteria-kriteria bagi setiap mata pelajaran yang akan menjadi KKM sekolah. Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) berdasarkan kriteria-kriteria yang sesungguhnya sangat membantu banyak pihak. Terutama sekali bagi guru mendapat tambahan ramhu-rambu di samping kurikulum yang dapat memfokuskan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajarannya. Dengan demikian dapat diketahui kelemahan-kelemahan untuk diperbaiki pada tahun-tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta



- Boediono, 1998. *Pembinaan Profesi Guru dan Psikologi Pembinaan Personalialia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mathis dan Jackson . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Prokton and W.M. Thornton 1983. *Latihan Kerja Buku Pegangan Bagi Para Manager*. Jakarta : Bina Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Fokus Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*, Jakarta, 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan*, Jakarta, 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Di rektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang *Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta. 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang *Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Sekolah Dasar dan Menengah*. Jakarta. 2014
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Fokus Media.
- Pawitan, Gandhi. (2009). *Statistika untuk Bisnis*, Bandung : Unpar
- Simamora, Henry. 1995. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YPKN.
- Sudibyoy, Bambang. *Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Sungkowo M, *Perangkat Penilaian Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.



Available online at : <https://ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JPP>

Jurnal Perspektif Pendidikan

| ISSN (Print) 0216-9991 | ISSN (Online) 2654-5004 |

DOI: <https://doi.org/10.31540/jpp.v15i2.1425>

Penerbit : LP4MK STKIP PGRI Lubuklinggau



- Sidi, Indra Djati. (2001). *Menuju Masyarakat Belajar*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu.
- Stone, David R., & Elwin C. Nielson. (1982). *Educational psychology :The development of teaching skills*. New York : Harper & Row Publishers
- Suparno, Paul. (1998). *Dasar dan orientasi pendidikan Jesuit, dalam P.J.Suwarno, Sanata Dharma menemukan jalannya*. Yogyakarta : USD
- Mulyasa , E..(2008) *Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumim Aksara.
- Mulyasa, E. (2010). *KTSP Suatu Panduan Praktis* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.